



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10140-10150

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Eksplorasi Ketidaksesuaian Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Psap No. 07: Studi Pada Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Zakia Ramadhani<sup>1</sup>, Samas Adimisa Mishbah Habibie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[22013010107@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010107@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>; [samas.adimisa.febis@upnjatim.ac.id](mailto:samas.adimisa.febis@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

*Manajemen aset tetap memainkan peran kritis dalam memastikan efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan di institusi sektor publik, terutama di organisasi layanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya PSAP No. 07, dapat merusak keandalan laporan keuangan dan berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab ketidakpatuhan dalam praktik manajemen aset tetap di Puskesmas dan RSUD. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengelola aset dan analisis dokumen catatan keuangan serta kebijakan internal. Temuan penelitian ini mengungkapkan empat masalah utama: pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan riil, penyusutan dicatat untuk aset yang tidak digunakan, ketidaksesuaian antara dokumen aset dan inventaris fisik, dan lemahnya pengendalian aset yang mengakibatkan kehilangan barang. Ketidakpatuhan ini didorong oleh tekanan sistem anggaran, keterbatasan keahlian teknis dan profesionalisme staf, serta budaya organisasi yang lebih mengutamakan kepatuhan administratif daripada efektivitas fungsional. Penelitian ini menyoroti perlunya reformasi sistemik, termasuk validasi kebutuhan pengadaan yang lebih ketat, peningkatan kompetensi staf, penunjukan personel manajemen aset yang berdedikasi, dan prosedur penghapusan aset yang terstruktur. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis awan direkomendasikan untuk meningkatkan pelacakan dan keamanan aset. Temuan ini menekankan bahwa manajemen aset tetap yang efektif tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi formal, tetapi juga penanaman tanggung jawab manajerial dan budaya akuntabilitas di institusi publik.*

*Kata kunci: Aset Tetap, PSAP No. 07, Pengelolaan Aset, Puskesmas, RSUD*

### 1. Latar Belakang

Praktik pengelolaan aset tetap di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan ketidaksesuaian dengan efisiensi dan akuntabilitas. Berdasarkan observasi dan pengalaman langsung penulis saat mengikuti proses audit oleh kantor akuntan publik, ditemukan sejumlah permasalahan seperti penyusutan atas barang yang belum digunakan, inventarisasi aset yang kurang memadai, kehilangan aset, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tugas. Tidak jarang pula pembelian aset dilakukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran, sementara ruang penempatan aset belum tersedia atau aset 2 hanya digunakan sebagai cadangan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keputusan pengadaan dan pengelolaan aset tetap diambil serta sejauh mana proses tersebut dipahami dan dilaksanakan oleh instansi terkait. Temuan-temuan tersebut mencerminkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan aset tetap tidak semata-mata bersifat teknis atau administratif, melainkan juga berkaitan dengan aspek manajerial, perilaku organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Meskipun pemerintah telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 sebagai acuan dalam pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penghapusan aset tetap, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2022 oleh BPK menemukan 2.205 temuan senilai Rp25,85 triliun yang terkait dengan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan (Warta Pemeriksa, 2023), dan sekitar 14 pemerintah daerah di antaranya memiliki permasalahan dalam pengelolaan aset tetap, termasuk pencatatan, penyusutan, dan keberadaan fisik asset (Warta Pemeriksa, 2024).

Ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset tetap tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga dapat mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Aset yang tidak dikelola dengan baik dapat

---

Eksplorasi Ketidaksesuaian Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Psap No. 07: Studi Pada Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

menyebabkan kesalahan dalam penyajian informasi keuangan. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak andal dan berisiko digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal yang salah. Ketidaktepatan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama akibat pemborosan anggaran untuk pengadaan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual, tidak segera dimanfaatkan, atau bahkan berakhir pada hilangnya aset. Penelitian terdahulu telah membahas berbagai kendala teknis dalam penerapan PSAP No. 07.

Studi di Dinas Kesehatan Kota Tegal mengungkapkan kelemahan dalam penghapusan dan pelepasan aset tetap (Hidayah et al., 2023), sementara penelitian di Kecamatan Ciwidey menyoroti kelemahannya sistem informasi aset (Rosidah et al., 2024). Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara belum menerapkan penyusutan aset (Kaawoan et al., 2024), dan BPKAD Kabupaten Jeneponto menghadapi kendala minimnya pemahaman SDM serta lemahnya pengawasan internal (Fahriatul Fathonah et al., 2024). Fokus mereka cenderung terbatas pada pemenuhan administratif. Belum banyak penelitian yang menggali secara mendalam konteks sosial, perilaku, serta kebiasaan manajerial yang mempengaruhi praktik pengelolaan aset tetap secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap terhadap ketentuan PSAP No. 07 di lingkungan Puskesmas dan RSUD. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami realitas di balik praktik pengelolaan aset tetap melalui perspektif para pelaksana di lapangan, serta mengungkap faktor yang penyebab penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan.

Untuk memahami penyebab ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap terhadap PSAP No. 07 di lingkungan Puskesmas dan RSUD, penting terlebih dahulu melihat bahwa aset tetap dalam sektor publik memiliki karakter yang berbeda dengan aset dalam sektor privat. Pada institusi layanan kesehatan milik pemerintah, aset tetap tidak semata dinilai dari kemampuan menghasilkan laba, tetapi lebih sebagai sarana pelayanan publik yang berkaitan dengan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan kesehatan. Karena itu, pengadaan dan pengelolaan aset seharusnya berorientasi pada kebutuhan layanan, ketersediaan ruang, kesiapan SDM, dan rencana pemeliharaan jangka panjang. Namun dalam praktik, aset sering diperlakukan sebagai sekadar “barang” yang harus dibeli dan dicatat untuk memenuhi prosedur administratif. Cara pandang seperti ini menghasilkan pola pengelolaan yang kurang memperhatikan siklus hidup aset, sehingga muncul berbagai konsekuensi seperti penumpukan aset, keterlambatan pemanfaatan, atau bahkan kehilangan fisik aset.

Ketidaksesuaian dalam praktik pengelolaan aset tetap juga erat berkaitan dengan fenomena pengambilan keputusan yang bersifat birokratis. Dalam banyak kasus, keputusan pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang lebih menekankan penyerapan anggaran dibandingkan kebutuhan aktual. Tekanan untuk “menghabiskan anggaran” sering kali muncul karena adanya kekhawatiran bahwa anggaran tahun berikutnya akan dipotong bila serapan rendah, atau karena penilaian kinerja unit kerja lebih dititikberatkan pada realisasi belanja dibandingkan efektivitas manfaat. Akibatnya, pembelian aset dapat dilakukan tanpa perencanaan matang, misalnya membeli alat kesehatan yang belum bisa digunakan karena ruangan belum tersedia, listrik belum memadai, atau operator belum dilatih. Pada kondisi tertentu, aset hanya berakhir sebagai cadangan yang jarang digunakan, padahal nilainya besar dan penyusutan tetap berjalan dalam pembukuan.

Selain faktor anggaran, aspek manajerial juga memegang peranan penting. Pengelolaan aset tetap membutuhkan koordinasi lintas fungsi: bagian perencanaan, pengadaan, penatausahaan barang, unit pengguna, keuangan, serta auditor internal. Namun dalam kenyataan, koordinasi ini sering berjalan tidak optimal. Di beberapa instansi, terdapat tumpang tindih tugas akibat keterbatasan SDM. Satu pegawai bisa merangkap sebagai pengurus barang, penyusun laporan keuangan, sekaligus menjalankan tugas layanan administratif lainnya. Kondisi ini membuat kualitas pencatatan aset menjadi kurang akurat, inventarisasi tidak rutin dilakukan, dan pengawasan terhadap keberadaan fisik aset menjadi lemah. Bahkan ketika terjadi kehilangan aset, proses penelusuran sering kali sulit dilakukan karena dokumen pendukung tidak lengkap dan sistem pengendalian internal tidak berjalan konsisten.

Di sisi lain, ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap juga dapat dijelaskan melalui perilaku organisasi. Kebiasaan kerja yang sudah mengakar dalam birokrasi, seperti kecenderungan mengutamakan formalitas dokumen dibandingkan substansi, dapat mempengaruhi praktik aset. Misalnya, pencatatan aset mungkin dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi tidak diikuti dengan pengecekan fisik secara memadai. Hal ini dapat menimbulkan situasi di mana aset tercatat “ada” di neraca, tetapi secara nyata aset tersebut rusak, tidak ditemukan, atau tidak dapat digunakan. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena institusi layanan kesehatan memiliki kebutuhan aset yang beragam dan teknis: alat medis membutuhkan kalibrasi, pemeliharaan berkala, serta standar keamanan tertentu. Tanpa manajemen aset yang kuat, barang yang

bernilai besar dapat cepat usang, rusak, atau tidak sesuai kebutuhan layanan, sehingga menimbulkan risiko pemborosan dan kerugian negara.

Lebih lanjut, implementasi PSAP No. 07 sendiri menuntut pemahaman yang cukup mengenai konsep pengakuan, pengukuran, dan penyusutan. Dalam beberapa kasus, penyusutan dilakukan atas aset yang belum digunakan karena aset sudah tercatat sebagai aset tetap pada saat perolehan, padahal secara substansi aset belum siap dipakai. Hal ini menunjukkan adanya gap pemahaman antara konsep akuntansi pemerintahan dan realitas operasional. Pencatatan yang dilakukan semata-mata berdasarkan dokumen pengadaan sering mengabaikan aspek kesiapan penggunaan (*ready for use*). Akibatnya, laporan keuangan mencerminkan penyusutan yang “benar secara administratif” tetapi kurang tepat secara substantif. Ketidaktepatan ini tidak hanya mempengaruhi nilai aset dalam laporan, tetapi juga dapat mengaburkan penilaian efisiensi penggunaan aset serta mengganggu pengambilan keputusan manajerial.

Dari perspektif akuntabilitas publik, persoalan pengelolaan aset tetap di Puskesmas dan RSUD menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Aset tetap biasanya merupakan komponen besar dalam neraca pemerintah daerah. Ketika pencatatan aset tidak akurat, risiko kesalahan penyajian laporan keuangan meningkat. Laporan yang tidak andal dapat berdampak pada opini audit serta menurunkan kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik. Dalam konteks layanan kesehatan, dampaknya bahkan lebih luas: alat kesehatan yang tidak optimal pemanfaatannya dapat berujung pada layanan yang tidak maksimal, keterbatasan fasilitas untuk pasien, dan inefisiensi operasional yang akhirnya merugikan masyarakat.

Temuan BPK yang menyebut ribuan temuan senilai puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan tidak dapat dipandang sebagai kasus terpisah. Permasalahan aset sering kali muncul berulang dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola. Ini juga mengindikasikan bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi semata, melainkan membutuhkan perubahan pada cara organisasi memahami aset, mengontrolnya, serta menilai manfaatnya dalam pelayanan. Dalam konteks ini, penguatan pengendalian internal menjadi sangat relevan, misalnya melalui SOP inventarisasi berkala, audit internal yang lebih aktif, penguatan sistem informasi aset, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas apabila terjadi kehilangan atau ketidaksesuaian.

Keterbatasan sistem informasi aset juga menjadi faktor penting yang sering muncul dalam berbagai penelitian terdahulu. Namun, penelitian sebelumnya cenderung membahasnya pada level teknis seperti aplikasi yang tidak terintegrasi atau pencatatan yang tidak lengkap. Padahal, akar persoalan bisa lebih dalam: sistem informasi mungkin tersedia tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan pelatihan, resistensi perubahan, atau budaya kerja yang lebih nyaman dengan pencatatan manual. Dalam beberapa kasus, data aset yang ada di sistem tidak diperbarui secara rutin, sehingga informasi menjadi tidak *real-time* dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini memperlihatkan bahwa teknologi saja tidak cukup; faktor manusia dan budaya organisasi menjadi penentu utama keberhasilan implementasi sistem.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memiliki ruang kontribusi yang kuat karena menempatkan ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap bukan sekadar masalah kepatuhan, melainkan fenomena organisasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dapat menggali lebih dalam bagaimana para pelaksana memahami aturan, apa saja tekanan dan realitas yang mereka hadapi, serta bagaimana praktik sehari-hari terbentuk dari kebiasaan dan norma informal organisasi. Misalnya, mengapa inventarisasi tidak dilakukan secara rutin? Apakah karena keterbatasan waktu, kurangnya dukungan pimpinan, atau karena inventarisasi dianggap tidak prioritas dibanding tugas layanan? Mengapa pengadaan dilakukan meski ruang tidak tersedia? Apakah karena tekanan serapan anggaran, atau karena komunikasi perencanaan yang kurang antara unit pengguna dan pengambil keputusan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tidak selalu bisa dijawab melalui penelitian kuantitatif, karena membutuhkan penelusuran makna dan konteks yang melekat pada pengalaman pelaksana.

Lebih jauh, penelitian ini juga dapat menyoroti bagaimana akuntabilitas dipahami dan dijalankan di tingkat operasional. Dalam praktik, akuntabilitas tidak selalu dipahami sebagai tanggung jawab substansi, melainkan sering dipersempit menjadi “kelengkapan dokumen”. Jika dokumen ada, maka dianggap aman, meskipun aset belum digunakan atau tidak ditemukan. Dalam konteks audit, pegawai sering berorientasi pada memenuhi permintaan auditor dalam jangka pendek, bukan membangun sistem pengelolaan aset jangka panjang. Kecenderungan ini dapat menimbulkan budaya kerja reaktif: perbaikan baru dilakukan saat audit, sementara pada periode normal, proses pengelolaan berjalan minimal.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademik mengenai ketidaksesuaian PSAP No. 07, tetapi juga dapat menawarkan rekomendasi praktis yang relevan untuk instansi. Rekomendasi tersebut dapat mencakup aspek penguatan manajemen aset berbasis siklus hidup, peningkatan kapasitas SDM, pembagian tugas yang jelas, serta strategi mengubah budaya organisasi dari administratif ke substantif. Dengan demikian, pengelolaan aset tetap di Puskesmas dan RSUD dapat diarahkan pada prinsip efisiensi, transparansi, serta kebermanfaatan bagi pelayanan publik. Pada akhirnya, pengelolaan aset tetap bukan hanya persoalan angka dalam laporan keuangan, tetapi mencerminkan kualitas tata kelola organisasi dan komitmen terhadap pelayanan publik. Ketika aset dikelola dengan baik, maka sumber daya publik digunakan secara optimal, laporan keuangan menjadi lebih andal, dan layanan kesehatan dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika aset tidak dikelola secara akuntabel, maka bukan hanya pemerintah yang dirugikan, tetapi masyarakat sebagai penerima layanan juga akan merasakan dampaknya secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya memahami realitas pengelolaan aset tetap secara lebih menyeluruh dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor kesehatan daerah.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pendekatan studi kasus karena efektif untuk menelaah secara rinci fenomena ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap dengan standar PSAP No. 07 dalam konteks manajerial, perilaku organisasi, serta efisiensi pengelolaan aset pada Puskesmas dan RSUD. Sejalan dengan pendapat (Busetto et al., 2020) penelitian kualitatif paling tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan “mengapa sesuatu terjadi”, terutama saat meneliti fenomena kompleks dan kontekstual seperti pengelolaan aset di sektor kesehatan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman holistik dan mendalam terhadap praktik pengelolaan aset tetap yang sebenarnya di lapangan. Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer didapatkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan pendekatan purposive, yaitu pengelola aset, staf keuangan, dan kepala unit pada Puskesmas dan RSUD.

Adapun data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen relevan seperti laporan keuangan, berita acara, SPJ belanja modal, dan kebijakan internal terkait pengelolaan aset tetap. Penelitian ini mencakup Puskesmas dan RSUD yang menjadi klien audit tempat peneliti melaksanakan magang. Unit-unit tersebut dipilih berdasarkan keterlibatan langsung peneliti dalam proses audit serta ditemukannya indikasi ketidaksesuaian pengelolaan aset tetap terhadap PSAP No. 07. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik berdasarkan kerangka sistematis enam langkah yang dikemukakan oleh (Naeem et al., 6 2023) dalam jurnal *International Journal of Qualitative Methods*. Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan familiarisasi data, dilanjutkan dengan pemilihan kata kunci, pengkodean data, pengembangan tema, konseptualisasi hubungan antara tema, dan akhirnya perumusan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara tema-tema dan prinsip PSAP No. 07.

## 3. Hasil dan Diskusi

### A. Pembelian aset tidak berdasarkan kebutuhan nyata

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan praktik pembelian aset pada anggaran akhir tahun yang tidak didasarkan pada kebutuhan aktual. Beberapa aset dibeli meskipun ruang penempatannya belum tersedia atau masih dalam tahap rekonstruksi, sehingga aset tersebut hanya disimpan digudang penyimpanan barang. Salah satu staf menyebutkan bahwa pembelian dilakukan karena khawatir anggaran tahun berikutnya akan terpotong jika dana tidak terserap habis.

*“kalau tidak segera dibelikan, takutnya tahun depan anggaran dana dipotong atau dikurangi karena masih tersisa, dan mereka (pemerintah) menganggap kelebihan dalam pemberian dana (staf aset tetap RSUD)”*

Praktik pembelian aset yang tidak berdasarkan kebutuhan nyata, mencerminkan tekanan koersif dari sistem penganggaran yang mendorong organisasi menyerap dana secara penuh demi menjaga legitimasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori *New Institutional Sociology* (NIS). Karena aset tetap tersebut belum digunakan, maka perhitungan penyusutan belum dapat dimulai sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa aset disusutkan saat telah siap dipakai. Namun, pencatatan atas pembelian aset tetap tetap dilakukan dalam

laporan keuangan, yaitu di neraca dengan nilai perolehan. Kemudian penundaan pemakaian aset dapat menimbulkan risiko penurunan nilai manfaat atau nilai wajar karena masa penyimpanan terlalu lama, yang pada akhirnya dapat memengaruhi akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah.

Fenomena pembelian aset pada akhir tahun anggaran tanpa dasar kebutuhan nyata merupakan persoalan klasik dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pembelian dilakukan bukan karena adanya kebutuhan operasional yang mendesak, tetapi lebih sebagai upaya untuk menghabiskan anggaran agar tidak terjadi pengurangan pagu pada tahun berikutnya. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa logika penganggaran instansi pemerintah sering kali tidak berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, melainkan pada upaya mempertahankan legitimasi anggaran di mata otoritas pengendali, seperti pemerintah daerah atau pusat.

Salah satu staf aset menyebutkan bahwa pembelian dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa sisa anggaran akan dianggap sebagai ketidakefisienan, sehingga pagu tahun depan dipangkas. Pernyataan ini menggambarkan tekanan koersif sebagaimana dijelaskan dalam teori New Institutional Sociology (NIS), yaitu ketika organisasi melakukan tindakan tertentu bukan karena pertimbangan rasional internal, tetapi karena adanya tekanan eksternal berupa regulasi, ekspektasi birokrasi, atau ancaman pengurangan sumber daya. Dalam konteks ini, RSUD atau puskesmas berupaya mempertahankan posisinya dalam struktur politik-birokratis dengan menunjukkan bahwa seluruh anggaran dapat terserap sepenuhnya.

Namun, pembelian aset tanpa perencanaan jangka panjang justru menimbulkan beberapa persoalan akuntabilitas. Pertama, banyak aset yang belum memiliki ruang penempatan karena bangunan masih dalam tahap rekonstruksi. Aset tersebut akhirnya ditumpuk di gudang penyimpanan yang tidak selalu memiliki standar keamanan dan kelayakan penyimpanan. Kondisi penyimpanan yang tidak ideal dapat mempercepat kerusakan fisik, menurunkan umur manfaat aset, atau bahkan menurunkan nilai wajar akibat tidak terpelihara. Dalam konteks PSAP No. 07, penyusutan atas aset baru dimulai saat aset tersebut siap digunakan. Artinya, aset yang menumpuk di gudang tidak dapat disusutkan, meskipun sudah dicatat dalam neraca sebagai aset tetap.

Kedua, fenomena ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil lapangan. Dalam laporan, aset tercatat memiliki nilai perolehan tertentu, namun manfaatnya belum terealisasi karena belum digunakan. Hal ini memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan karena nilai aset tampak besar tetapi tidak berkontribusi pada pelayanan publik. Akuntabilitas pemerintah daerah menjadi dipertanyakan, terutama terkait efisiensi penggunaan dana publik. Aset yang tidak dimanfaatkan pada waktunya juga berpotensi mengalami penurunan nilai manfaat (*impairment*) yang pada akhirnya harus diakui sebagai kerugian.

Ketiga, pembelian yang dilakukan berdasarkan motif mempertahankan anggaran mencerminkan bahwa sistem perencanaan kebutuhan (*planning*) belum berjalan optimal. Perencanaan seharusnya berfokus pada analisis kebutuhan riil, kondisi sarana, kemampuan pemeliharaan, serta proyeksi manfaat jangka panjang. Namun dalam praktiknya, perencanaan sering kali hanya bersifat administratif menyusun daftar kebutuhan untuk keperluan dokumen RKA tanpa adanya kajian yang benar-benar mendalam terhadap urgensi aset tersebut.

Dalam perspektif NIS, tindakan organisasi seperti ini merupakan bentuk pencarian legitimasi (*legitimacy seeking behavior*) demi memenuhi ekspektasi atasan, auditor, atau pemerintah lebih tinggi. Namun, legitimasi tersebut bersifat seremonial (*ceremonial conformity*), yaitu organisasi mematuhi aturan hanya pada tataran formal untuk terlihat patuh, tanpa memperhatikan substansi manfaat dari aturan tersebut. Akibatnya, aset yang dibeli tidak memberikan nilai tambah bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pola seperti ini dapat menciptakan pemborosan anggaran (*budget wastage*). Aset yang dibeli tetapi belum digunakan tetap memerlukan biaya pemeliharaan, perawatan, dan keamanan. Hal ini menciptakan tambahan beban bagi pemerintah daerah. Jika aset tidak dikelola dengan baik, risiko kehilangan, kerusakan, atau penggunaan yang tidak sesuai dapat meningkat. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat merugikan negara tidak hanya secara finansial, tetapi juga dari sisi pelayanan publik, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan strategis justru dialihkan pada pembelian barang yang belum diperlukan.

Dari sisi manajerial, fenomena pembelian aset tanpa kebutuhan nyata juga mencerminkan lemahnya koordinasi antarunit. Unit pengguna sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan, sehingga barang yang datang tidak sesuai kebutuhan operasional. Hal ini menyebabkan aset mangkrak. Idealnya, perencanaan kebutuhan dilakukan melalui mekanisme *bottom-up*, di mana unit pelayanan menentukan barang apa yang benar-benar diperlukan berdasarkan analisis *workload*, standar pelayanan minimal, dan proyeksi beban kerja.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa budaya organisasi sektor publik masih sangat dipengaruhi oleh orientasi administratif. Alih-alih berorientasi pada kinerja dan pemanfaatan aset secara optimal, pegawai lebih fokus pada bagaimana prosedur dapat diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika budaya seperti ini terus berlanjut, maka sulit bagi organisasi untuk mengembangkan perilaku pengelolaan aset yang strategis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, keberadaan tekanan politik dan auditor juga berperan dalam membentuk perilaku organisasi. Auditor sering menilai efektivitas serapan anggaran sebagai indikator kinerja, padahal sejatinya efektivitas harus dinilai berdasarkan output dan outcome, bukan sekadar persentase realisasi anggaran. Tekanan koersif dari auditor, meskipun tidak disengaja, turut melanggengkan budaya "menghabiskan anggaran" di akhir tahun.

Oleh karena itu, pembenahan harus dimulai dari reformulasi sistem perencanaan kebutuhan aset, peningkatan pemahaman staf tentang aset tetap, serta perubahan budaya organisasi agar lebih berorientasi pada manfaat dan efektivitas. Tanpa perubahan tersebut, praktik pembelian aset yang tidak berdasarkan kebutuhan nyata akan terus berulang dan berpotensi mengurangi kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## **B. Penyusutan atas aset yang belum digunakan**

Peneliti menemukan bahwa penyusutan telah mencatat aset yang belum dimanfaatkan dan masih berada di gudang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan PSAP No. 07 yang menyatakan bahwa penyusutan dimulai ketika aset siap digunakan, bukan saat diterima. Dalam perspektif New Institutional Sociology (NIS), kondisi ini mencerminkan tekanan normatif, di mana pelaksana akuntansi cenderung mengikuti kebiasaan administratif yang sudah berlaku tanpa memahami substansi aturannya. Minimnya pemahaman teknis oleh SDM terkait aset tetap juga menunjukkan lemahnya internalisasi profesionalisme, sehingga praktik yang dijalankan lebih bertujuan memenuhi bentuk formal pelaporan daripada mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Temuan penelitian menunjukkan adanya praktik penyusutan aset tetap yang dilakukan meskipun aset tersebut belum masuk ke tahap siap pakai atau belum dimanfaatkan sama sekali dalam kegiatan operasional instansi kesehatan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, kondisi ini jelas bertentangan dengan PSAP No. 07, yang secara tegas menyatakan bahwa penyusutan dimulai ketika aset berada pada kondisi ready for use, bukan sejak aset diterima, dicatat, atau dipindahkan ke gudang penyimpanan. Ketidaksihinggaan ini bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan cerminan adanya gap yang cukup serius antara aturan normatif dan praktik lapangan.

Ketika peneliti menggali lebih dalam melalui wawancara, ditemukan bahwa pencatatan penyusutan dilakukan secara otomatis setiap akhir periode pelaporan berdasarkan daftar aset yang tercatat dalam sistem, tanpa verifikasi apakah aset tersebut benar-benar telah digunakan atau belum. Praktik ini merupakan bagian dari "kebiasaan administratif" yang sudah berlangsung lama dan jarang dipertanyakan. Para staf teknis yang menangani aset tetap cenderung mengikuti pola kerja rutin tanpa memahami substansi dari aturan akuntansi yang mengatur penyusutan aset. Pada titik inilah tekanan normatif dalam kerangka New Institutional Sociology (NIS) terlihat dengan jelas. Tekanan normatif muncul ketika organisasi mengikuti standar atau praktik tertentu hanya karena "begitulah seharusnya", tanpa memahami atau mengevaluasi kesesuaiannya dengan kondisi nyata.

Minimnya pelatihan teknis dan rendahnya internalisasi pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan mengakibatkan staf lebih fokus pada pemenuhan bentuk formal pelaporan, bukan pada akurasi tidaknya informasi yang dihasilkan. Dengan kata lain, terjadi isomorfisme normatif yang membuat praktik penyusutan hanya mengikuti pola umum tanpa mempertimbangkan konteks masing-masing aset. Dampaknya, laporan keuangan menjadi kurang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, karena terdapat beban penyusutan atas aset yang bahkan belum pernah digunakan oleh instansi pelayanan kesehatan.

Selain itu, fenomena ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara bagian perencanaan, pegawai pengelola aset, dan bagian akuntansi. Ketiadaan mekanisme pengecekan fisik sebelum penyusutan dihitung membuat pencatatan keuangan berjalan otomatis tanpa didukung data valid. Hal ini dapat mengakibatkan laporan keuangan memuat informasi yang tidak wajar, misalnya:

1. Aset tampak berkurang nilainya padahal belum pernah digunakan, sehingga nilai bukunya tidak mencerminkan manfaat sebenarnya.
2. Beban penyusutan meningkat, memengaruhi neraca dan laporan operasional secara tidak wajar.
3. Kesalahan penilaian aset dalam jangka panjang, karena umur manfaat berkurang tidak sebanding dengan masa pakai riil.

Dari perspektif tata kelola, praktik ini dapat melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketika aset tidak digunakan namun tetap disusutkan, maka publik maupun pihak pengawas akan sulit menilai efisiensi penggunaan anggaran negara. Beban penyusutan seolah menggambarkan bahwa aset telah berkontribusi terhadap layanan kesehatan, padahal secara fisik masih berada di gudang dan tidak memberikan manfaat apa pun. Jika ditinjau dari teori NIS, fenomena ini juga menunjukkan adanya decoupling, yaitu pemisahan antara praktik formal (pencatatan penyusutan) dan realitas operasional (aset belum digunakan). Organisasi berusaha menunjukkan bahwa mereka patuh pada aturan akuntansi melalui laporan keuangan, tetapi praktik tersebut tidak terhubung dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, kepatuhan hanya terjadi di atas kertas.

Untuk memperbaiki hal ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan, seperti:

- Melakukan verifikasi fisik aset sebelum proses penyusutan dilakukan setiap periode.
- Memperkuat pelatihan staf agar memahami aturan substansial dalam PSAP.
- Meningkatkan koordinasi antar unit agar data aset lebih akurat.
- Mengembangkan SOP yang mewajibkan penilaian “siap pakai” sebelum penyusutan dimulai.

Dengan memperbaiki proses ini, akuntabilitas dan kesesuaian laporan keuangan terhadap kondisi riil dapat ditingkatkan secara signifikan.

### C. Ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik aset

Ketika peneliti melakukan pengecekan aset, peneliti melihat staf kebingungan dalam menunjukkan aset yang tertulis di daftar inventaris aset dengan barang fisiknya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kode atau spesifikasi barang, kurangnya labelisasi yang jelas, dan kesamaan fisik antar barang dari tahun pengadaan yang berbeda. Temuan ini mencerminkan lemahnya sistem inventarisasi aset, dalam konteks pengendalian internal hal ini menunjukkan tidak optimalnya aktivitas pengendalian dan informasi-komunikasi, karena tidak tersedianya data aset yang akurat dan mudah di akses bagi petugas yang bertanggung jawab. Menurut (Ardiani, 2020) inventarisasi aset memainkan peran penting dan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengelolaan aset tetap. Artinya jika inventarisasi dilakukan secara tertib dan akurat, maka pengelolaan dan pemanfaatan aset akan menjadi lebih optimal. Dalam perspektif teori New Institutional Sociology (NIS), fenomena ini mencerminkan adanya tekanan mimetik, di mana pengelolaan aset dilakukan hanya dengan meniru prosedur formal tanpa penyesuaian substansi dengan kebutuhan organisasi.

Ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik aset merupakan salah satu temuan paling krusial dalam proses penelitian ini, terutama ketika peneliti melakukan verifikasi langsung terhadap daftar inventaris dan mencocokkannya dengan kondisi aset yang ada di lapangan. Pada saat pengecekan, terlihat jelas bahwa staf pengelola aset mengalami kebingungan dalam menunjukkan barang yang sesuai dengan daftar, karena terdapat banyak aset yang tidak memiliki label, memiliki kode berbeda, atau bahkan memiliki bentuk fisik yang hampir sama sehingga sulit dibedakan antar tahun pengadaan. Ketidakselarasan ini tampak seolah menjadi masalah kecil administratif, namun secara substantif mencerminkan lemahnya sistem pengendalian aset dan minimnya mekanisme inventarisasi yang terstruktur.

Situasi ini menunjukkan bahwa proses pencatatan aset hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa memperhatikan keakuratan dan keterlacakan barang. Akibatnya, daftar aset yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan tidak dapat diandalkan sebagai dokumen yang mencerminkan kondisi riil. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pencatatan formal dengan realitas pengelolaan aset yang sesungguhnya. Ketika staf diminta menunjukkan aset tertentu, respon mereka menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya sistem pendukung yang memadai. Data pada daftar inventaris terlihat tidak mutakhir, tidak mencerminkan kondisi terkini, dan tidak diperbarui ketika terjadi perpindahan lokasi barang. Dengan demikian, data yang seharusnya menjadi instrumen utama pengendalian justru berubah menjadi dokumen pasif yang tidak berfungsi secara optimal.

Dalam konteks pengendalian internal, kondisi ini menggambarkan ketidakefektifan dua komponen penting, yaitu aktivitas pengendalian dan informasi-komunikasi. Aktivitas pengendalian semestinya memastikan bahwa aset selalu dapat ditelusuri secara jelas, sedangkan informasi-komunikasi berfungsi menyediakan data yang akurat, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang memerlukan. Ketika keduanya tidak berjalan, maka alur pengelolaan aset menjadi terhambat. Aset yang tidak diberi label dengan benar berpotensi besar hilang, terpakai oleh unit lain tanpa pencatatan, atau bahkan tidak dilakukan pemeliharaan yang

seharusnya. Ketidakpastian terkait lokasi dan identitas aset juga membuat proses audit menjadi sulit, karena auditor hanya dapat memverifikasi aset berdasarkan dokumen yang tidak merepresentasikan kondisi sesungguhnya.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori New Institutional Sociology (NIS), khususnya dalam bentuk tekanan mimetik. Tekanan mimetik terlihat ketika suatu organisasi meniru praktik-praktik formal dari instansi lain atau mengikuti prosedur administratif hanya untuk terlihat sesuai dengan standar birokrasi, tanpa memahami makna dan tujuan sesungguhnya dari praktik tersebut. Dalam kasus ini, instansi kesehatan tampak mengikuti prosedur inventarisasi sebagaimana tertulis dalam pedoman pemerintah, namun penerapannya tidak disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kompleksitas jenis aset yang dimiliki. Proses inventarisasi hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan tahunan, bukan sebagai alat pengendalian yang berfungsi memastikan bahwa aset dikelola secara efisien dan bertanggung jawab.

Ketidaksesuaian antara dokumen dan fisik aset juga menimbulkan berbagai risiko signifikan dalam jangka panjang. Aset yang tidak teridentifikasi dengan baik berpotensi hilang tanpa diketahui, dan hal ini baru disadari ketika dilakukan pemeriksaan oleh auditor atau pihak berwenang. Selain itu, kesalahan spesifikasi dalam pencatatan dapat menyebabkan keputusan anggaran menjadi tidak tepat. Misalnya, suatu bagian mungkin mengusulkan pembelian barang baru karena merasa kekurangan, padahal sebenarnya barang tersebut ada namun tidak ditemukan atau tercatat dengan salah. Situasi ini menciptakan pemborosan anggaran dan ketidakefektifan perencanaan. Ketidakakuratan data inventaris juga berdampak pada keterlambatan proses penghapusan aset, karena persyaratan penghapusan mengharuskan kecocokan antara data administrasi dan fisik. Ketika kecocokan ini tidak ada, staf harus melakukan penelusuran tambahan yang memakan waktu, atau bahkan terpaksa menunda proses penghapusan. Penundaan ini akan berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi aset yang sesungguhnya, sehingga akuntabilitas laporan keuangan menjadi terganggu.

Ketidakselarasan antara dokumen dan fisik aset merupakan salah satu faktor yang secara signifikan memperlemah tata kelola aset pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembenahan sistem inventarisasi yang lebih modern dan sistematis, misalnya dengan penggunaan barcode, QR code, atau sistem manajemen aset berbasis digital yang dapat memperbarui posisi dan kondisi barang secara real time. Selain itu, peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan mengenai pencatatan, penelusuran, dan pelabelan aset perlu menjadi prioritas. Proses inventarisasi tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin tahunan, melainkan sebagai bagian integral dari pengelolaan aset yang berkelanjutan. Dengan memperbaiki sistem inventarisasi dan memastikan kecocokan antara dokumen dan fisik aset, organisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mengurangi risiko-risiko pengelolaan aset yang selama ini sering terjadi. Ketika data aset akurat, maka proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan dapat berjalan dengan jauh lebih efektif.

#### **D. Minimnya pengendalian aset fisik dan keamanan**

Dalam wawancara, seorang staf mengungkapkan adanya kehilangan aset setelah digunakan dalam kegiatan internal, karena tidak diketahui keberadaannya pasca acara.

*“terkadang sehabis acara barang-barang yang di pinjam bisa hilang, di simpan atau dipindahkan entah ke mana. Karena selama ini tidak merasa kehilangan ketika adanya pengecekan dari pihak berwenang baru menyadari kalau barang tersebut hilang, walaupun sebenarnya tetap berada di kawasan ini tetapi tidak tahu di mana (staf aset tetap RSUD)”*

Kehilangan aset setelah digunakan dalam kegiatan internal menunjukkan lemahnya pengendalian dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelacakan aset tetap. Dalam perspektif New Institutional Sociology (NIS), hal ini mencerminkan bahwa aturan formal sudah ada, tetapi belum diikuti dengan nilai-nilai profesionalisme dalam praktiknya. Artinya, pengelolaan aset tetap tidak cukup hanya mengandalkan prosedur, melainkan harus didukung oleh budaya organisasi yang menjunjung akuntabilitas dan tanggung jawab bersama terhadap aset publik.

Minimnya pengendalian fisik dan keamanan aset terlihat dari adanya kasus aset yang hilang setelah digunakan dalam kegiatan internal tanpa ada dokumentasi atau pelacakan yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa prosedur peminjaman, penggunaan, dan pengembalian aset tidak dijalankan secara disiplin. Ketika staf menyampaikan bahwa barang sering hilang atau sulit ditemukan setelah acara, hal ini memberikan gambaran bahwa tidak ada mekanisme penanggung jawab yang tegas untuk memastikan aset kembali pada lokasi yang

seharusnya. Staf baru menyadari kehilangan aset ketika dilakukan audit atau pengecekan, yang berarti pemantauan harian atau rutin tidak berjalan.

Dari sudut pandang teori NIS, kelemahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal yang mengatur tata kelola aset dengan praktik keseharian. Aturan ada, namun tidak diinternalisasi sebagai nilai organisasi. Kelemahan budaya pengawasan dan rasa tanggung jawab bersama membuat aset publik dianggap kurang penting atau kurang dijaga sebagaimana mestinya. Dalam konteks tata kelola, kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengendalian internal khususnya pada aspek safeguarding of assets, yang seharusnya memastikan bahwa seluruh aset terlindungi dari kehilangan, penyalahgunaan, atau pemindahan tanpa izin.

Kondisi ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti meningkatnya biaya penggantian aset, hilangnya aset secara permanen, dan potensi temuan audit yang berulang. Dalam organisasi publik, hilangnya aset bukan hanya masalah nilai ekonomis, tetapi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan instansi dalam mengelola anggaran negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan fisik, pencatatan perpindahan aset, hingga pemberian tanggung jawab individu atau unit tertentu perlu dilakukan agar keamanan aset lebih terjamin.

#### **E. Beban kerja ganda dan keterbatasan SDM**

Selama proses pengumpulan data, peneliti menemukan bahwa staf yang mengelola aset juga merangkap tugas lain seperti keuangan atau administrasi. Meskipun adanya sistem bergilir antar staf, hal ini berdampak pada rendahnya fokus dan akurasi pengelolaan aset tetap.

*“sebenarnya ini bukan kerja utama saya, karna dilakukan secara bergilir (staff aset tetap Puskesmas)”*

Penugasan staf yang merangkap tugas dalam pengelolaan aset tetap menunjukkan bahwa alokasi SDM belum didasarkan pada profesionalisme, melainkan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Hal ini mencerminkan isomorfisme mimetik yaitu, organisasi meniru praktik administratif hanya untuk tampak sah di mata eksternal, bukan demi efisiensi. Akibatnya, beban kerja ganda dan rotasi staf membuat pengelolaan aset tidak fokus dan kurang akurat, sehingga melemahkan akuntabilitas. Seperti dijelaskan (Izzah et al., 2024), kondisi ini bisa meningkatkan tekanan mental pegawai dan menurunkan kinerja secara keseluruhan.

Beban kerja ganda merupakan persoalan yang cukup sering ditemukan dalam instansi pemerintah, termasuk dalam pengelolaan aset tetap. Dalam penelitian ini, staf yang bertanggung jawab mengelola aset ternyata juga merangkap pekerjaan lain seperti administrasi umum, keuangan, atau pelayanan. Sistem rotasi atau tugas bergilir membuat staf tidak memiliki fokus yang memadai untuk memahami detail teknis pengelolaan aset tetap. Kondisi ini berdampak pada ketidakakuratan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta ketidakteraturan inventarisasi.

Fenomena ini selaras dengan konsep isomorfisme mimetik, di mana instansi hanya meniru struktur organisasi secara formal tanpa memastikan bahwa SDM yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan. Pengelolaan aset menjadi tugas administratif yang dianggap sederhana, sehingga tidak mendapatkan prioritas SDM yang memadai. Padahal, pengelolaan aset membutuhkan pengetahuan teknis mulai dari pencatatan, penilaian, labelisasi, hingga pelaporan yang sesuai standar akuntansi.

Beban kerja ganda juga berpotensi meningkatkan tingkat stres pegawai, menurunkan produktivitas, serta menyebabkan kesalahan yang dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan. Ketika staf bekerja tanpa fokus, proses verifikasi fisik, penyusunan daftar inventaris, dan pencatatan perpindahan aset tidak dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, aset menjadi tidak terkelola dengan baik. Perbaikan membutuhkan kebijakan alokasi SDM yang lebih proporsional, pelatihan khusus, serta pengurangan praktik rotasi yang mengabaikan spesialisasi.

#### **F. Keterlambatan dalam pengakuan dan penghapusan**

Peneliti juga menemukan bahwa beberapa aset yang telah dihapuskan secara fisik, namun belum direklasifikasi dalam neraca dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Proses penghapusan yang memakan waktu menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Prosedur penghapusan yang kurang efektif ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam kebijakan-kebijakan baru terkait pengelolaan aset di masa mendatang. Selain itu, kondisi ini mencerminkan rendahnya tanggung jawab dan partisipasi para pimpinan dalam mengoordinasikan proses penghapusan aset secara tepat waktu dan akuntabel.

Keterlambatan dalam pengakuan dan penghapusan aset menjadi masalah yang berdampak langsung terhadap ketepatan laporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa aset telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, namun belum dihapus dari neraca. Hal ini membuat laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya, karena aset yang secara fisik sudah tidak bernilai tetap tercatat memiliki nilai buku. Proses penghapusan yang lambat biasanya disebabkan oleh panjangnya prosedur birokrasi, kurangnya koordinasi antar unit, serta ketidaksiapan dokumen pendukung seperti berita acara, foto kondisi barang, atau hasil pemeriksaan teknis. Keterlambatan ini membuat akuntansi aset tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu proses perencanaan anggaran karena instansi terlihat masih memiliki aset padahal sebenarnya tidak dapat dimanfaatkan.

Dilihat melalui teori NIS, situasi ini mencerminkan lemahnya partisipasi pimpinan dalam memastikan tata kelola aset berjalan efektif. Organisasi tampak patuh secara formal pada prosedur penghapusan, namun tidak berkomitmen memastikan proses berjalan tepat waktu. Hal ini menyebabkan fenomena ceremonial compliance, di mana instansi hanya mengikuti bentuk aturan tanpa memastikan substansi dan ketepatannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan fungsi koordinasi, percepatan proses pemeriksaan kondisi aset, serta pembaruan SOP penghapusan agar lebih responsif dan akuntabel.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pengelolaan aset tetap pada instansi pemerintah masih mengandung berbagai ketidaksesuaian terhadap PSAP No. 07, baik dari aspek pengadaan, penyusutan, inventarisasi, hingga penghapusan. Praktik pembelian aset tanpa kebutuhan nyata, penyusutan atas aset yang belum digunakan, serta keterlambatan penghapusan mencerminkan gejala decoupling yaitu keterputusan antara praktik administratif yang tampak patuh secara formal dengan implementasi substansi yang lemah di lapangan. Dalam perspektif teori New Institutional Sociology (NIS), kondisi ini terjadi karena adanya tekanan koersif dari sistem penganggaran, tekanan normatif akibat lemahnya profesionalisme, serta tekanan mimetik berupa peniruan praktik administratif dari institusi lain, bukan karena pertimbangan efisiensi yang sesungguhnya. Gejala ini menunjukkan bahwa organisasi cenderung menampilkan kepatuhan prosedural demi legitimasi eksternal, namun belum mampu mewujudkan efektivitas substantif dalam pengelolaan aset publik. Untuk mengatasinya, diperlukan validasi kebutuhan sebelum pengadaan, peningkatan kompetensi staf, alokasi SDM khusus, SOP penghapusan yang terstruktur, serta penerapan teknologi berbasis cloud. Sejalan dengan (Sahat et al., 2025), solusi digital ini dapat menyediakan akses real-time dan dashboard lintas unit, sehingga mempermudah pelacakan dan meminimalkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi fisik aset.

#### Referensi

1. Ardiani, S. (2020). PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. *JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI*, Vol. 4 No. 1 (2020): *JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI*, 20–31.
2. Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>
3. Fahriatul Fathonah, N., Sofyan Hasan, K., & Ervan Marzuki, M. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Analysis of Fixed Assets Management Based on Minister of Home Regulation Number 19 Of 2016 Concerning Guidelines For Management of Regional Owned Goods. <https://mahesacenter.org/https://journal.mahesacenter.org/index.php/jlpr/index>
4. Hidayah, W. L., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. *Ekono Insentif*, 17(1), 49–58. <https://doi.org/10.36787/jei.v17i1.1124>
5. Izzah, A., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2024). Analisis Beban Kerja Penugasan Ganda Dalm Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Bululawang. 18(6), 76–87.
6. J. (2024). ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 07 PADA AKUNTANSI ASET TETAP DI KANTOR KECAMATAN CIWIDEY (Vol. 2, Issue 2).
7. Kaawoan, Y. M., Runtu, T., Kindangen, W. D., Yohana Kaawoan, O. M., Runtu, T., Kindangen, W. D., & Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, F. (2024). ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FIXED ASSET ACCOUNTING BASED ON PSAP NO.07 AT THE COOPERATIVES AND SMES OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE. 12(3), 1534–1543.
8. KSAP. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP 07 Tentang Aset Tetap, 07, 1–14.
9. Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitatif Methods*, 22(October), 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
10. Rosidah, I., Kesumah, P., Kurniawan, S., & Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi,
11. Sahat, Diki Akhwan Mulya, & Samas Adimisa Mishbah Habibie. (2025). OPTIMALISASI CLOUD COMPUTING UNTUK MENINGKATKANKEBERLANJUTAN BISNIS PERSPEKTIF SISTEM INFORMASI BISNIS.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3535>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

12. Savitri, R. A., & Fanani, Z. (2017). The Institutionalization of Accrual Accounting: The Perspective of New Institutional Sociology Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 100–109. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10618>
13. Tuanakotta, T. M. (2019). Audit Internal Berbasis Risiko.
14. Warta Pemeriksa. (2023, June 20). IHPS II 2022 Ungkap Temuan Senilai Rp25,85 Triliun. *Warta Pemeriksa*.
15. Warta Pemeriksa. (2024, November 28). Periksa Pengelolaan Aset Pemda, Ini Hasil Temuan BPK. *Warta Pemeriksa*.